

**PENERAPAN ASAS KEADILAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN**

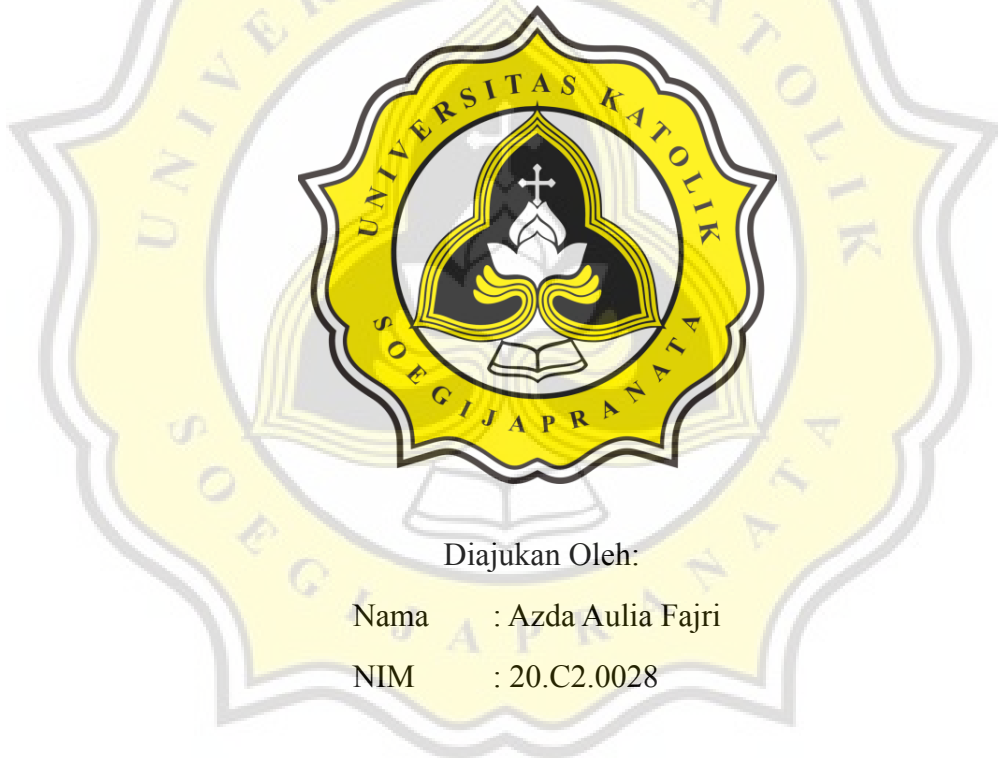
**(STUDI ANALISIS PEMENUHAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN
DI KABUPATEN TEGAL)**

TESIS

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh:

Nama : Azda Aulia Fajri

NIM : 20.C2.0028

Kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PENERAPAN ASAS KEADILAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN
(STUDI ANALISIS PEMENUHAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN
DI KABUPATEN TEGAL)

Diajukan oleh : Azda Aulia Fajri
NIM : 20.C2.0028
Tanggal disetujui : 05 Agustus 2022
Telah setuju oleh
Pembimbing 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Pembimbing 2 : dr. C. Tjahjono Kuntjoro Ph.D
Penguji 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Penguji 2 : dr. C. Tjahjono Kuntjoro Ph.D
Penguji 3 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=20.C2.0028

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :

“PENERAPAN ASAS KEADILAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN (STUDI ANALISIS PEMENUHAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN TEGAL)” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 8 Agustus 2022



Azda Aulia Fajri
NIM 20.C2.0028

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Azda Aulia Fajri
NIM : 20.C2.0028
Program Studi : Magister Hukum Kesehatan
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan izin kepada Pihak Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Karya ilmiah yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS KEADILAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN (STUDI ANALISIS PEMENUHAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN TEGAL)”** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Pihak Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalih-formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 Agustus 2022



Azda Aulia Fajri
NIM 20.C2.0028

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena tas ijin-Nya, penulisan tesis dengan judul “Penerapan Asas Keadilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (Studi Analisis Pemenuhan Hak Peserta BPJS Kesehatan Di Kabupaten Tegal) dapat penulis selesaikan.

Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan asas keadilan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan kesehatan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan yang secara peraturan perundang-undangan diberikan secara adil dan merata kepada setiap rakyat Indonesia. Dari hasil penelitian jaminan kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal tidak bisa menerapkan asas keadilan secara maksimal. Pemenuhan layanan kesehatan masih kurang memenuhi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan secara adil kurang maksimal. Hal ini disebabkan adanya kendala yang berupa kurangnya fasilitas dan pembatasan obat serta pembatasan plafon dari BPJS Kesehatan terhadap tindakan medis yang diambil oleh rumah sakit.

Penulis menyadari bahwa terselesainya tesis ini berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi, M.Si. selaku rektor Universitas Katolik Soegijopranoto Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menempuh Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijopranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H. Selaku ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijopranata
4. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H.,M.H., Selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sampai tesis ini selesai.
5. dr. C. Tjahjono Kuntjoro, Ph.D., Selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sampai tesis ini selesai.
6. Ignatius Hartyo Puswanto, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijopranata
7. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff Program Magister Hukum Kesehatan Unika Sogijopranata Semarang.
8. Kedua orang yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

9. Istriku tercinta dr. Deby Priscika Putri dan Anandaku Muhammad Nafis Abulcasis Azbynanda yang selalu mencurahkan kebahagiaannya kepada penulis.
10. Moh. Yaqin, S.H.I, S.Hum, atas kerelaannya membantu penulis dalam bertukar pikiran selama ini
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesisi ini bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum kesehatan.

Semarang, 8 Agustus 2022

Peneliti,

Azda Aulia Fajri

ABSTRAK

BPJS Kesehatan sebagai lembaga publik yang diamanahkan oleh Presiden sebagai penyelenggara Jaminan Sosial termasuk bidang kesehatan. Secara praktek, BPJS Kesehatan menjalankan tugasnya dengan mengacu pada asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Asas keadilan sebagai asas penting agar setiap masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara utuh tanpa unsur diskriminasi. Mengingat sila kelima dari Pancasila sebagai dasar negara mengatur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga diskriminasi dalam layanan kesehatan harus ditiadakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas keadilan BPJS terhadap pemenuhan hak peserta dalam jaminan kesehatan, upaya dan kendalanya di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji keadaan empiris atau nyata dalam masyarakat tentang penerapan hukum khususnya hukum kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan asas keadilan BPJS Kesehatan terhadap pemenuhan hak peserta dalam jaminan kesehatan di Kabupaten Tegal menunjukkan masih belum maksimal. Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara totalitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan tipekal peserta PBI maupun Non-PBI dengan peserta non JKN secara umum telah diperlakukan adil dan merata. Akan tetapi untuk peserta JKN ada pembatasan biaya plafon pada tindakan tertentu, kendala sarana, dan obat-obatan non formularium, mengakibatkan peserta JKN tidak bisa memperoleh pelayanan pengobatan yang maksimal. Upaya yang dilakukan dalam menerapkan asas keadilan berupa inovasi rumah sakit ataupun dari BPJS Kesehatan dalam layanan kesehatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: *Asas Keadilan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan*

ABSTRACT

The Health Social Security Administering as a public institution mandated by the President as the organizer of Social Security, including the health sector. In practice, The Health Social Security Administering carries out its duties by referring to the principles regulated in Law Number 36 of 2009 concerning BPJS (The Social Security Administering). The principle of justice is an important principle so that every community can obtain health services as a whole without discrimination. Remembering the fifth precept of Pancasila as the basis of the state to regulate social justice for all Indonesian people. So that discrimination in health services must be eliminated. The purpose of this study was to examine and analyze the application of The Social Security Administering principle of justice to the fulfillment of participants' rights in health insurance, its efforts and obstacles in Tegal Regency.

The research method used in this research is sociological juridical, namely research that examines empirical or real conditions in society regarding the application of law, especially health law, organized by The Health Social Security Administering.

The results of this study are the application of the BPJS Kesehatan principle of justice to the fulfillment of participants' rights in health insurance in Tegal Regency shows that it is still not optimal. The implementation of total health insurance for National Health Insurance (JKN) participants with typical PBI and Non-PBI participants with non-JKN participants has generally been treated fairly and equitably. However, for JKN participants there is a ceiling fee limit for certain actions, facilities constraints, and non-formulary drugs, resulting in JKN participants not being able to get maximum treatment services. Efforts are made to apply the principle of justice in the form of hospital innovation or from BPJS Health in health services by referring to Law Number 36 Of 2009 concerning Health.

Key Word: *Principles of Justice, The Health Social Security Administering, Health Insurance.*

MOTTO

“AMAT VICTORIA CURAM, VICTORY LOVES PREPARATION”



DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penyajian Tesis.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Asas, dan Norma/Kaidah Hukum	22
1. Konsep tentang Asas Hukum	22
2. Konsep tentang Norma/Kaidah Hukum.....	24

B. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan	26
1. Pengertian Keadilan	26
2. Keadilan Menurut Para Filosof	29
3. Asas Keadilan Menurut Pancasila.....	32
4. Hubungan Hukum dengan Keadilan.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	
1. Pengertian, Fungsi dan Tugas BPJS Kesehatan.....	39
2. Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan	44
3. Penerapan Asas Keadilan Dalam BPJS Kesehatan.....	46
D. Kajian Teori Tentang Jaminan Kesehatan Nasional	
1. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional	50
2. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	52
3. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	54
4. Hak Dan Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.....	61
5. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional.....	62
6. Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional	65
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	73
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	73
2. Hasil Wawancara dengan Responden	74
B. Pembahasan	
1. Penerapan asas keadilan BPJS terhadap pemenuhan hak peserta	

	dalam jaminan kesehatan di Kabupaten Tegal	95
2.	Upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam menerapkan asas keadilan terhadap pemenuhan hak peserta dalam jaminan kesehatan di Kabupaten Tegal.....	113
3.	Kendala dalam pelaksanaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam penerapan asas keadilan terhadap pemenuhan hak peserta dalam jaminan kesehatan di Kabupaten Tegal	118
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		